



Australian Government

# Akta Perkawinan bagi Warga Hindu Pastikan Kesejahteraan Keluarga



Pengesahan ulang pernikahan pasangan yang belum mempunyai akta perkawinan. ▲

*Pasangan Hindu di Sumbawa dan Lombok Utara yang telah bertahun-tahun menikah, akhirnya dapat memiliki akta perkawinan. LPA bersama KOMPAK melakukan sosialisasi dan memastikan bahwa pernikahan warga Hindu sah di mata negara. Dengan akta perkawinan, mereka dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga, yang merupakan syarat untuk mengakses berbagai program bantuan pemerintah.*

**N**engah Suparni berdebar-debar ketika membubuhkan cap jempol pada akta perkawinannya dengan I Nyoman Leterana. Setelah delapan tahun menikah, akhirnya warga Dusun Batu Rea, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Sumbawa ini dapat mengesahkan pernikahannya. "Terasa kami menikah lagi," ujar Nengah Suparni yang bergaya rapi dengan baju kebaya.



▲ Pasangan yang sudah mendapatkan akta perkawinan.

Perempuan berusia 39 tahun ini sontak menitikkan air mata ketika melihat anaknya yang turut hadir dalam acara yang diselenggarakan di Bale Banjar Panca Sari tersebut. "Saya bayangkan akta kelahiran anak saya akan bisa segera diterbitkan," jelas ibu satu anak ini. Akta kelahiran akan membantu anak semata wayangnya yang sudah berusia enam tahun untuk bisa masuk PAUD.

Saat menikah pada bulan Oktober 2011, Nengah Suparni berharap bisa langsung mendapatkan kutipan akta perkawinan. Namun banyaknya

pekerjaan di ladang dan ketidapahamannya akan persyaratan yang diperlukan membuat upayanya terbengkalai. Terlebih lagi, jarak dari Desa Stowe Brang menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sumbawa sekitar 50 km dan memakan biaya transportasinya Rp100.000 per kali jalan.

Akibatnya, pasangan petani ini tidak dapat mengurus dokumen kependudukan lainnya. "Kami kesulitan membuat akta kelahiran anak dan kartu keluarga sehingga kesulitan dalam menerima bantuan sosial," tutur Nengah Suparni.

Kendala yang sama dialami oleh Wayan Reka dan istrinya, Nyoman Disty. Meskipun telah memiliki dua orang putra, yang tertua sudah tamat SMK, pasangan petani jagung dan peternak ini tidak kunjung memiliki akta pernikahan.

Ketua Bale Banjar Panca Sari ini mengakui sebenarnya tidak ada diskriminasi bagi warga Hindu dalam mengurus akta perkawinan. Namun ketidaktahuan akan persyaratan yang diperlukan menghambatnya. "Kami memang tidak tahu terkait alur pengurusan akta perkawinan, kami hanya menunggu dokumen perkawinan yang diurus oleh Parisade," ujar Wayan Reka, yang berharap akta perkawinan akan membantu anak dan cucunya dalam bersekolah.

Itulah sebabnya pria berusia 45 tahun ini menyambut hangat ketika Lembaga Perlindungan Anak (LPA) datang ke Bale Banjar untuk membantu proses peresmian akta nikah. "Banyak anak yang belum punya akta kelahiran dan pasangan suami istri yang belum mempunyai akta nikah sehingga sulit mendapatkan bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bedah Rumah, BPJS dan sebagainya," tutur tim advokasi LPA, Fathilatul Rahmah.

Melihat jumlah warga Hindu di Kecamatan Utan khususnya di dua desa yaitu Desa Sabedo dan Desa Stowe Brang yang belum mempunyai akta nikah, maka LPA bersama Dinas Dukcapil Kab.Sumbawa, KOMPAK, dan Parisade Kecamatan Utan berkolaborasi untuk memastikan masyarakat dapat memiliki dokumen kependudukan dengan mudah, murah dan cepat. Upaya ini dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Bale Banjar.

Ketika mendengar tentang program tersebut, Nengah Suparni bersama warga lain yang sedang berada di ladang langsung berkumpul untuk mengikuti sosialisasi. "Kami langsung menyiapkan semua dokumen, didampingi oleh pihak pengurus Banjar, LPA dan Parisade Kecamatan," tutur Nengah Suparni.

Banjar Panca Sari dan Parisade kemudian membantu mengecek kelengkapan semua berkas yang diperlukan, seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, foto berwarna gandeng pasangan ukuran 4x6 serta mengisi formulir data pasangan dan data orang tua suami istri. "LPA, KOMPAK bersama Dukcapil Dan Pokja Adminduk membantu membuat KK, KTP, dan Akta Kelahiran bagi yang belum memiliki untuk melengkapi berkas," jelas Fathilatul.

Dua minggu kemudian, 35 pasangan berkumpul dalam ruangan berukuran 6 x 8 meter yang telah dihias sesuai adat istiadat Hindu. Janur kuning, spanduk kegiatan dan pakaian adat yang dikenakan pasangan suami istri turut menyemarakkan suasana Bale Banjar Panca Sari. "Istri saya menggunakan kebaya dengan sedikit *make-up*, terlihat cantik sekali!" kenang Wayan Reka yang juga mengenakan pakaian khas Bali.

Masing-masing pasangan ditanya nama orangtua masing-masing dan dalam keluarga sebagai anak ke berapa. Mereka kemudian harus mengisi tanda tangan atau cap jempol di atas selembur kertas sebagai bentuk pengesahan pasangan suami istri. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan Bale Banjar Panca Sari seakan-akan menyambut hari baru.

"Terlihat pancaran mata mereka yang penuh dengan rasa kebahagiaan seolah mereka pasangan suami istri yang baru menikah," tutur Fathilatul yang menyaksikan acara ini. Kegembiraan yang sama juga dirasakan di Kabupaten Lombok Utara, di mana LPA bersama KOMPAK mendampingi 20 pasangan suami-istri Hindu yang juga mendapatkan pengesahan Akta Perkawinan.

Berkat lengkapnya dokumen kependudukan, warga Hindu di Sumbawa dan Lombok Utara dapat mengakses berbagai program bantuan sosial yang berbasis data kependudukan. "Kini anak kami bisa sekolah dan ke posyandu. Kami sendiri juga bisa mengakses program sosial seperti PKH," tutur Nengah Suparni akan manfaat yang ia rasakan setelah memiliki Akta Perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya. Setelah mendapatkan Akta Perkawinan, Nengah Suparni segera merevisi KK dengan status perubahan perkawinan dan anak, membuat Akta Kelahiran dan Kartu Identitas anaknya yang dibantu oleh LPA, Bale Banjar, Pokja Adminduk dan Parisade Kecamatan.

Ketua Parisade Kecamatan Utan dan Alas, Made Sudiarta menargetkan 100% warganya untuk mempunyai Akta Perkawinan. "Kami disarankan Dukcapil untuk mengumpulkan 10-20 orang yang kita layani langsung di tempat. Dukcapil mempunyai layanan langsung cetak di tempat untuk Akta

Perkawinan, KIA (Kartu Identitas Anak), KK, KTP," jelas Made Sudiarta akan rencana program selanjutnya.

**Berkat lengkapnya dokumen kependudukan, warga Hindu di Sumbawa dan Lombok Utara dapat mengakses berbagai program bantuan sosial yang berbasis data kependudukan. "Kini anak kami bisa sekolah dan ke posyandu. Kami sendiri juga bisa mengakses program sosial seperti PKH," tutur Nengah Suparni akan manfaat yang ia rasakan setelah memiliki Akta Perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya. ■**

Jika target tersebut tercapai, semua warga Hindu di Sumbawa dan Lombok Utara dapat tersenyum seperti Wayan Reka dan warga lain yang telah memiliki Akta Perkawinan. "Senang rasanya bisa memegang Akta Perkawinan setelah 23 tahun menikah dan mempunyai cucu," tutup Wayan Reka.